

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH DENGAN ASISTENSI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**  
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya)

**Deddy A. Kawer**

[deddykawer76@gmail.com](mailto:deddykawer76@gmail.com)

**Yundy Hafizrianda**

**Maylen K. P. Kambuaya**

**Abstract**

*This research aims to examine the influence of apparatus competency and internal control systems on the quality of financial reporting. As well as testing the influence of apparatus competency and internal control systems on the quality of financial reporting which is moderated by financial assistants in the Intan Jaya Regency government. The independent variables used are the influence of Apparatus Competence, Internal Control System. The moderating variable is financial assistance, while the dependent variable is the quality of financial reporting. The sample for this research is people who are employees who have authority in the field of accounting or finance, totaling 83 respondents. The analytical tool in this research uses SPSS 23. This type of research is causality, namely testing the influence of independent variables on the dependent so that researchers use Moderation Regression Analysis (MRA). So the results of this research must meet the Classical Assumption Test, namely the Normality Test, Multicollinearity Test and Heteroscedesity Test. The results of this research partially show that Apparatus Competence and Internal Control Systems have an influence with significance values of 0.000 and 0.000 respectively. Meanwhile, Financial Assistance was unable to moderate the influence of Apparatus Competence and Internal Control Systems on the Quality of Financial Reporting with respective significance values of 0.857 and 0.147.*

**Keywords:** *apparatus competence; internal control system; financial assistance and quality of regional financial reporting*

**INTRODUCTION**

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi para pemangku kepentingan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan dengan kualitas baik mempermudah pengambilan keputusan dan alokasi potensi sumber daya secara optimal. Laporan keuangan tersaji untuk kepentingan umum dan informasi memainkan peran penting untuk mengurangi konflik kepentingan yang melekat dalam organisasi (Yetman dan Yetman, 2004). Menurut Watts dan Zimmerman (1990) pemanfaatan informasi tentang kondisi keuangan dan kinerja organisasi oleh berbagai pemangku kepentingan dapat membuat berbagai informasi penting untuk investor, kontraktor dan pengambilan keputusan.

Mengingat pentingnya informasi keuangan dalam pengambilan keputusan maka upaya tuntutan terhadap reformasi keuangan pemerintah terjadi pada awal Tahun 2000 berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Paradigma ini memberi konsekuensi bagi institusi pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa nilai informasi laporan keuangan merupakan dasar pelaporan keuangan dipemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui audit tahunan. Hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 (empat) kategori opini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) termasuk wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Lebih lanjut, representasi kewajaran dituangkan dalam opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.

Namun demikian, fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyangkut opini audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, perlunya evaluasi komprehensif

dalam upaya peningkatan kompetensi Aparatur terkait pengetahuan, keterampilan bidang akuntansi dan keuangan serta upaya dalam mengatasi kelemahan sistem pengendalian intern agar menjadi lebih efektif.

Beberapa bukti empiris hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Standar Akuntansi Pemerintah (Choirunisah, 2008; Rahayu et al., 2014). Hasil ini didukung pernyataan bahwa sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuannya (Sudarmanto, 2009). Dengan demikian, suatu sistem yang baik akan sia-sia apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai yang terdiri dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih dan Koeswayo, 2014) dan diukur dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku (Wyatt dalam Ruki, 2003) sumber daya manusia yang bersangkutan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena adanya fenomena perolehan opini pada LKPD di Pemerintah Kabupaten Intan Jaya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Disertai kondisi kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai dalam proses pelaporan keuangan dan penerapan SPIP yang belum efektif terhadap laporan keuangan diduga sebagai faktor penyebab perolehan opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan asistensi keuangan dalam proses pelaporan keuangan diduga akan memperkuat kompetensi Aparatur terhadap pencapaian kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Asistensi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi” (Studi pada pemerintah Kabupaten Intan Jaya).

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya. Sementara itu penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 88 responden yang diperoleh menggunakan rumus slovin. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data lapangan. Data lapangan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderate Regression Analysis (MRA).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Kualitas Data

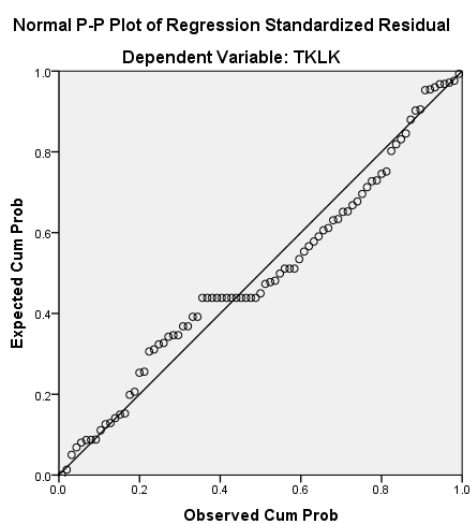
Berdasarkan hasil uji validitas setiap variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan di atas pada masing – masing variabel menunjukkan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan butir pertanyaan pada semua variabel dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha semua instrumen penelitian  $> 0,70$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur tiap-tiap variabel dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut, semua instrumen yang digunakan untuk mengukur tiap-tiap variabel dinyatakan valid dan reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

**Tabel 1. Uji Normalitas**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		83
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.91257957
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.079
	Negative	-.089
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.159 <sup>c</sup>

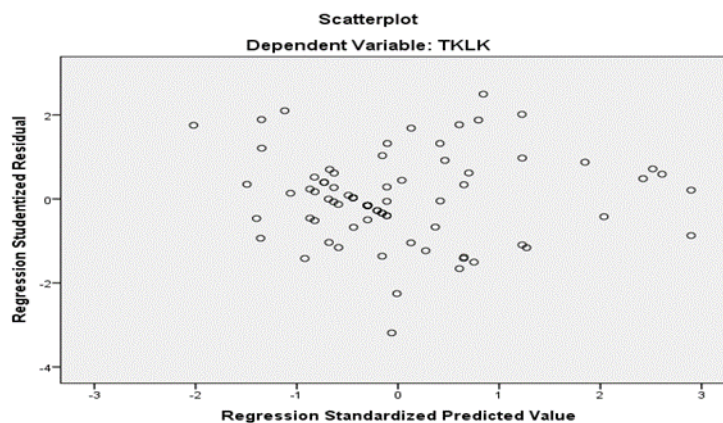


Berdasarkan tabel di atas, hasil Uji Normalitas dengan kolmogorov-smirnov test diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar  $0,159 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan, secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar di atas. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa model regresi yang dihasilkan berdistribusi normal. Hal tersebut terlihat melalui sebaran data residual yang berada disekitar garis diagonal (garis linear).

**Tabel 2. Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KA	.784	1.275
SPI	.691	1.447
AK	.718	1.393

Berdasarkan hasil tabel Uji Multikolinearitas di atas, didapatkan hasil bahwa nilai tolerance pada variabel KA  $0,784 > 0,1$  dan VIF  $1,275 < 10$ . Variabel SPI nilai tolerance  $0,691 > 0,1$  dan VIF  $1,447 < 10$ , dan variabel AK nilai tolerance  $0,718 > 0,1$  dan VIF  $1,393 < 10$  Maka dapat dinyatakan bahwa antara variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas.



Berdasarkan gambar hasil Uji Heterokesdastisitas dengan grafik scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar tidak beraturan secara acar di atas 0 maupun di bawah 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokesdastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

### Hasil Uji Hipotesis

**Tabel 3. Hasil Pengujian**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	65.843	50.266		1.310	.194
KA	.518	.228	.421	5.101	.000
SPI	.611	.189	.777	7.278	.000
AK	-2.367	2.170	-.980	-1.091	.279
AK_KA	-.008	.043	-.273	-.184	.854
AK_SPI	.052	.035	2.239	1.465	.147

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2023

Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar  $0.00 < \text{sig } 0,05$ . Dengan demikian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.

Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \text{sig } 0,05$ . Dengan demikian hipotesis pertama (H2) dalam penelitian ini diterima.

Hasil uji moderasi pada variabel Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan daerah dimoderasi oleh asistensi keuangan. Variabel Asistensi Keuangan tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan daerah di pemerintah kabupaten Intan Jaya. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.854 lebih besar dari sig 0.005. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak.

Hasil uji moderasi pada variabel Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan daerah dimoderasi oleh asistensi keuangan. Variabel Asistensi Keuangan tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan daerah di pemerintah kabupaten Intan Jaya. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.147 lebih besar dari sig 0.005. Dengan demikian hipotesis pertama (H4) dalam penelitian ini ditolak.

### Hasil Uji Koefisien Determinan

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.810 <sup>a</sup>	.655	.633	2.87256

a. Predictors: (Constant), AK\_SPI, TKA, TSPI, TAK, AK\_KA

b. Dependent Variable: TKLK

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R2*) yang diperoleh sebesar 0,633. Hal ini berarti 63,3% kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh adanya variabel Kompetensi Aparatur, sistem pengendalian internal dan interaksinya dan sisanya 37,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### **Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengujian pengaruh variabel kompetensi aparatur terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya. Artinya semakin baik kompetensi Aparatur maka akan semakin baik pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan teori kompetensi dan kepatuhan. Sebaliknya, jika pemerintah daerah memiliki kompetensi Aparatur yang minim, akan berimplikasi pada menurunnya kemampuan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Disamping itu, pengaruh yang signifikan menunjukkan kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika kompetensi aparatur semakin baik dimiliki oleh seorang pegawai OPD Pemerintah Daerah maka berdampak pada semakin baik pula implementasi yang dilakukan dari segala ketentuan yang ada dalam PP nomor 71 Tahun 2010 salah satunya yaitu kualitas laporan keuangan. Namun sebaliknya jika semakin buruk kompetensi yang dimiliki aparatur di OPD Pemerintah Daerah maka semakin menurun pula mereka mengimplementasikan segala ketentuan yang ada pada PP nomor 71 Tahun 2010 sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dikemukakan oleh (Wastika, 2013), menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan SKPD, sejalan dengan hasil penelitian (Kurniawati, S. D., Sudarwadi, H., & Mokodompit, 2019), menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Anshori, 2018), yang hasilnya menunjukkan



sumber daya manusia tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **Sistem Pengendalian Intern Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengujian pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya. Artinya semakin memadainya implementasi sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan telaah teori manajemen keuangan daerah. Sebaliknya, jika implementasi SPIP yang kurang memadai oleh pemerintah daerah, akan berimplikasi pada menurunnya kemampuan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Disamping itu, pengaruh yang signifikan menunjukkan system pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa system pengendalian intern yang memadai dan dipahami serta diimplementasikan oleh OPD Pemerintah Daerah maka berdampak pada semakin tinggi kualitas laporan keuangan. Namun sebaliknya jika semakin rendah implementasi SPIP oleh OPD Pemerintah Daerah maka semakin menurun pula kualitas laporan keuangan. Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa setiap OPD diwajibkan untuk memahami dan mengimplementasikan SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Kodon et al., 2023; Siahay et al., 2023).

### **Asistensi Keuangan Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Variabel asistensi keuangan tidak mampu memperkuat kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika asistensi keuangan tidak mampu memperkuat kompetensi Aparatur,

maka tidak akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Asistensi keuangan tidak dikategorikan sebagai variabel moderasi Hal ini dikarenakan, interaksi antara Kompetensi Aparatur dan Asistensi keuangan tidak mengubah arah pengaruh dan tingkat signifikan hubungan langsung antara Kompetensi Aparatur dengan Kualitas Laporan Keuangan menjadi tidak signifikan.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel asistensi keuangan tidak dapat dijadikan sebagai variabel moderasi atau kuasi moderasi dalam memperkuat pengaruh antara kompetensi Aparatur dengan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa asistensi keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil menunjukkan tidak adanya hubungan positif, variabel moderasi asistensi keuangan searah dengan hubungan antara kompetensi aparatur dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pegawai OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya mayoritas bukan berlatar belakang Pendidikan dibidang keuangan sehingga ada asistensi yang dilakukan bagi pegawai pada OPD masih rendah, maka kompetensi aparatur akan semakin menurun dan berpengaruh terhadap menurunnya pemahaman mereka dalam menyelesaikan laporan keuangan sehingga laporan keuangan kurang berkualitas. Hal ini dapat dilihat pada karakteristik responden yang menunjukkan bahwa 86.7% pegawai di seluruh OPD berasal dari latar belakang non keuangan.

### **Asistensi Keuangan Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Variabel asistensi keuangan tidak mampu memperkuat sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika asistensi keuangan tidak mampu memperkuat kompetensi Aparatur, maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel asistensi keuangan tidak bisa sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi hubungan antara system pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa asistensi keuangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil menunjukkan adanya hubungan positif namun tidak signifikan, variabel moderasi asistensi keuangan searah dengan hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangannya. Jika pegawai OPD Pemerintah Kabupaten Intan Jaya didampingi dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang baik maka akan meningkat dan berdampak pada semakin baik mereka menyelesaikan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, jika pendampingan sering dilaksanakan maka kemungkinan akan membuat Aparatur tidak bisa berkembang karena bergantung kepada pendampingan yang dilakukan bagi Aparatur, oleh karena itu, system pengendalian intern yang baik akan mendukung pengelolaan keuangan.

### **SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan pada bab IV maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (2) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (3) Tidak Terdapat pengaruh dan tidak signifikan variabel moderasi asistensi keuangan terhadap hubungan antara kompetensi Aparatur dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (4) Tidak Terdapat pengaruh dan tidak signifikan variabel moderasi asistensi keuangan terhadap hubungan antara kompetensi Aparatur dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## REFERENCES

- Anshori, M. A. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekobis Dewantara. Universitas Sarjanawijayata Tamansiswa: Yogyakarta*.
- Kodon, K. P., Safkaur, O., Ngutra, R. N., & Salle, H. T. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 8(3).
- Kurniawati, S. D., Sudarwadi, H., & Mokodompit, M. P. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah *Economy Studies*,. *Journal of Fiscal and Regional*, Vol 2 (2), Hal: 67 – 75.
- Siahay, A. Z. D., Salle, H. T., & Afdal, I. (2023). Determinants of Financial Reports Quality in the Regional Government of Jayapura City. *Journal Of International Conference Proceedings*, 6(5).
- Wastika. (2013). *Pengaruh Kompetensi Staf dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan SKPD (Pada Pemerintahan Kota Padang)*.
- Indriasih, D. dan Koeswayo P. S., 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control toward the Quality of Financial Reporting and its Impact on the Performance Accountability in Local Government. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol.5. Issue 1, pp.90 - 100.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Penendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
- Permadi, A.D. 2013. Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Penelitian tidak dipublikasi. Universitas Widyatama Bandung*.

- Prasetyo, A. dan S.S. Pangemanan, 2014. Analisis Dampak Reviu Inspektorat terhadap Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Minahasa Tenggara TA 2010 dan 2011. *Jurnal Accountability vol.3, No. 1.*
- Rahayu,L., Kennedy, dan Y. Anisma, 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *JOM FEKON Vol. 1 No. 2, Hal 1-15*
- Sudarmanto, 2014. *Kinerja dan pengembangan Kompetensi SDM : Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam organisasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara
- Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Watts, R.L dan J.L. Zimmerman, 1990. Positive Accounting Theory : A Ten Year Perspective. *The Accounting Review vol.65, No. 1,pp.131-156*
- Yetman, M.H. and R.J. Yetman, 2004. The effects of governance on the Financial Reporting Quality of Nonprofit organizations. *Accounting, Organizations and Society, vol 23, pp.361-375.*